

SINERGI TNI ANGKATAN DARAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

(Studi Kasus di Kabupaten Badung Provinsi Bali)

Oleh: Agus Subagyo* & Yudi Rusfiana**

*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani Cimahi

E-mail: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

***) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This paper would like to describe the synergy between the Army and the Government in the handling of natural disasters, by taking case study on the cooperation of Kodim 1611/Badung with Local Government of Badung Regency, both in the pre-disaster stage, during the disaster and after the disaster as for the research methods and approaches used is qualitative descriptive. Theories and concepts that are considered relevant to this research are related to disaster management and synergies.

Based on the results of the research, it can be understood that the synergies held by Kodim 1611/Badung with Badung District Government are quite effective, although there are still obstacles in the handling of natural disasters, in the form of budget constraints, infrastructure, quality of personnel, sectoral ego between agencies, both parties, and low awareness of the community in the handling of natural disasters. Therefore, what should be done by both agencies is strengthening coordination, communication and collaboration on budget, means, personnel embodied in the MoU

Keywords: *synergy, army, government, natural disaster.*

ABSTRAK

Tulisan ini ingin menguraikan tentang sinergi TNI AD dengan Pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, dengan mengambil studi kasus pada kerja sama Kodim 1611/Badung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, baik pada tahap sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana adapun metode dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori dan konsep yang dianggap relevan dengan penelitian ini di antaranya terkait dengan manajemen bencana dan sinergitas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa sinergi yang digelar Kodim 1611/Badung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berjalan cukup efektif, walaupun masih terdapat hambatan dalam penanggulangan bencana alam, berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, kualitas personel, ego sektoral antar instansi, belum adanya MoU antara kedua pihak, dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam penanggulangan bencana alam. Karena itu yang perlu dilakukan oleh kedua instansi tersebut adalah perkuatan kooordinasi, komunikasi dan kolaborasi pada anggaran, sarana, personel yang diwujudkan dalam MoU.

Kata kunci: sinergi, TNI AD, pemerintah, bencana alam.

PENDAHULUAN

Pada perspektif geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yang sangat strategis baik dari aspek geopolitik, geoekonomi maupun geopertahanan dan keamanan. Selain itu, dilihat dari aspek demografi, jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang mampu menciptakan bonus demografi dan kekuatan yang luar biasa pada era globalisasi saat ini. Ditambah dengan aspek sumber kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke yang kaya akan sumber minyak, gas, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Semua itu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh menjadi salah satu kekuatan super power di dunia.

Namun demikian, dibalik posisi strategis, jumlah penduduk yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah, terdapat ancaman yang membahayakan bagi bangsa Indonesia. ancaman tersebut adalah bencana alam. Wilayah Indonesia berada dalam *ring of fire* (cincin api) yang rentan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Banyaknya gunung berapi yang berpotensi terjadinya gunung meletus yang membahayakan nyawa manusia. Di sebagian besar wilayah Indonesia rawan terjadi bencana alam, seperti tanang longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin topan, angin badai, putting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, maupun berbagai ancaman bencana alam lainnya, yang selalu membayangi masyarakat Indonesia.

Bencana alam yang terjadi tentunya akan mengakibatkan kerugian nyawa dan harta benda. Program-program pembangunan terancam oleh serangkaian bencana yang setiap saat dapat menimpa wilayah-wilayah Indonesia. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak korban jiwa meninggal dunia setiap tahunnya akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia yang terjadi secara sporadis dan kadangkala sulit diprediksi sebelumnya. Kerusakan infra struktur fisik, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas vital lainnya

akibat bencana berakibat pada aktivitas warga masyarakat karena jembatan hancur, jalan rusak, maupun fasilitas pemerintahan dan perkantoran lainnya yang lumpuh.

Kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana harus ditumbuhkan sejak dini baik di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sosial lainnya. Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus mampu melakukan sosialisasi dan pembimbingan kepada masyarakat bahwa Indonesia rawan bencana dan kita semua hidup ditengah-tengah bencana, yang mana kapan saja bencana dapat terjadi, dimana saja bencana bisa menimpa, dan siapa saja dapat terkena bencana.

Upaya penanggulangan bencana, baik pada tahap sebelum bencana/pra bencana, saat bencana/masa bencana, dan setelah bencana/pasca bencana, harus dilakukan oleh berbagai pihak, melibatkan pemerintah, masyarakat, kekuatan masyarakat sipil, maupun komunitas bisnis. Sinergi dalam penanggulangan bencana alam harus terus ditingkatkan agar supaya mampu mengurangi resiko bencana, mendeteksi kapan terjadinya bencana, maupun melakukan upaya-upaya mitigasi bencana sedini mungkin. Tanpa adanya sinergi antar berbagai pihak terkait, maka penanggulangan bencana alam akan mengalami hambatan.

Salah satu sinergi yang harus dioptimalkan secara terus menerus adalah sinergi antara TNI AD dengan Pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana alam baik di pusat maupun di daerah. TNI AD sebagai kekuatan pertahanan darat di Indonesia mengemban misi tidak hanya menangkal, menindak dan menghancurkan musuh semata, melainkan juga mengemban misi sipil (*civic mission*), berupa membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya di Pasal 7, ayat 2, butir 12, yang berbunyi: “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Hal inilah yang mendasari secara

yuridis bagi TNI AD untuk terus berkomitmen membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam bekerjasama dengan semua komponen bangsa lainnya.¹

Salah satu Satuan komando kewilayahan/satuan teritorial TNI AD yang saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kesiapan penanggulangan bencana alam adalah Kodim 1611/Badung yang berada di wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Satuan Kodim 1611/Badung merupakan salah satu Satkowil/satuan teritorial TNI AD yang berada di bawah struktur organisasi satuan Korem 163/Wirasatya dan satuan Kodam IX/Udayana. Di bawah pengarahannya, pembinaan, dan pengawasan Pangdam IX/Udayana dan Danrem 163/Wirasatya, Kodim 1611/Badung menggelar berbagai program dan kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam sehingga diharapkan dapat mendukung program pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Badung pada khususnya dan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Bali pada umumnya.

Wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali sangat strategis apabila dilihat dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. **Dalam aspek politik**, wilayah Kabupaten Badung memiliki dinamika kehidupan politik yang sangat dinamis karena berada di tengah-tengah Provinsi Bali sehingga menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan di lokal maupun tingkat nasional. **Dalam aspek ekonomi**, wilayah Kabupaten Badung merupakan pusat ekonomi, Pusat Bisnis dan Pusat Perdagangan di Provinsi Bali. Di wilayah ini terdapat pusat turisme, wisatawan asing/mancanegara maupun domestik, dan menjadi barometer ekonomi pariwisata di Provinsi Bali.

Dalam aspek sosial budaya, wilayah Kabupaten Badung mayoritas beragama Hindu yang diwarnai dengan suasana religius, namun di wilayah ini pula terdapat penduduk pendatang yang beragama non hindu dan banyak penduduk asing dengan gaya hidup dan pola hidup yang heterogen dan kompleks karena bercampur antara penduduk asli Bali dan penduduk pendatang. **Dalam aspek pertahanan keamanan**, wilayah Kabupaten Badung sangat strategis untuk dijadikan sebagai wilayah pertahanan karena berdekatan dengan negara tetangga, yakni Australia, sehingga perlu perencanaan wilayah pertahanan yang akan mendukung pembangunan daerah.

Dalam perspektif kebencanaan, wilayah Kabupaten Badung memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Di wilayah ini terdapat daerah rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, pohon tumbang, putting beliung, dan kebakaran². Bencana tersebut pernah terjadi di wilayah Kabupaten Badung dalam kurun tahun 20017 dan 2018 walaupun masih dalam eskalasi kecil, tepatnya di Kecamatan Petang berupa bencana longsor yang tidak saja menutup akses jalan, tapi beberapa juga merusak rumah warga. beruntun rentetan bencana tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Selain longsor banjir sempat terjadi di wilayah Kuta³. Bayangkan saja apabila terjadi bencana alam di wilayah ini dalam eskalasi yang besar, maka akan memengaruhi ekonomi dan pariwisata di wilayah Bali. Kabupaten Badung adalah etalase terdepan Provinsi Bali sehingga ketika terjadi bencana alam, maka akan memengaruhi kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan asing, karena masyarakat internasional akan khawatir berkunjung ke wilayah ini yang pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian Bali dan pembangunan daerah di Provinsi Bali.

1 Seskoad, *Sinergitas TNI AD dengan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana*, Bandung, 2017: 2.

2 Laporan Tahunan Kodim 1611/Badung, Tahun 2017.

3 Data Dinas Bina Marga Kabupaten Badung, 2017

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara TNI AD (Kodim 1611/Badung) dengan pemerintah (Pemda Kabupaten Badung) dalam menanggulangi bencana alam sehingga akan mampu mendukung program pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga dilandasi oleh penelitian terdahulu/kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Ketut Suartini, yang menulis skripsi dengan judul: “Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung Dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014”, di Fakultas ISIP Universitas Udayana Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Badung dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam secara garis besar sudah berjalan maksimal, sudah baik, dan memuaskan. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokusnya pada sinergi antara Kodim 1611/Badung dengan Pemerintah Daerah, khususnya BPBD Kabupaten Badung, dalam menanggulangi bencana alam, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun sesudah bencana.

KERANGKA TEORETIS

Bencana merupakan kombinasi antara ancaman (*Hazard*) dan kerentanan (*Vulnerability*). Ancaman yaitu fenomena, bahaya atau resiko, baik alami maupun tidak alami yang dapat (tetapi belum tentu menimbulkan bencana di antaranya banjir, tanah longsor, kekeringan, wabah penyakit, konflik bersenjata dll. Sedangkan kerentanan adalah keadaan didalam suatu komunitas yang membuat mereka mudah terkena akibat buruk dari ancaman di antaranya kerentanan fisik, sosial, dan psikologi/sikap⁴.

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan

analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.⁵ Manajemen bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana, berupa strategi dan kebijakan dalam antisipasi, pencegahan, dan penanganan bencana. Tujuannya, mencegah, memprediksi dan mengantisipasi bencana sebatas kemampuan serta meminimalkan kerugian. Proses manajemen bencana melibatkan empat tahapan, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggapan (*response*), dan pemulihan (*recovery*).⁶

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap:⁷ **Pertama**, Pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Pencegahan (*prevention*); upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Misalnya: pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, biopori, penanaman tanaman keras di lereng bukit untuk menghindari banjir dan sebagainya. Namun perlu disadari bahwa pencegahan tidak bisa 100% efektif terhadap sebagian besar bencana. Mitigasi (*mitigation*); yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya: penataan kembali lahan desa agar terjadinya banjir tidak menimbulkan kerugian besar. Kesiapsiagaan (*preparedness*); yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri

4 <http://wahyuekobudianto.blogspot.co.id/2013/06/siklus-disaster-manajemen.html>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.

5 <http://maysandi.blogspot.co.id/2012/04/manajemen-bencanamanajemen-bencana.html>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.

6 <http://www.jakartaconsulting.com/publications/articles/organization-development-behavior/manajemen-bencana-juni-2006>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.

7 <http://dm added.net/siklus-manajemen-bencana/>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.

dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Kedua, Saat bencana/Tanggap Darurat (*Emergency Response*), atau saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *search and rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian. **Ketiga**, Pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan (*recovery*); adalah suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi.

Proses *recovery* terdiri dari:

- (1) Rehabilitasi: perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek.
- (2) Rekonstruksi: perbaikan yang sifatnya permanen. pada konteks penanggulangan bencana, aspek sinergi sangat urgent dilakukan oleh semua pihak tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga TNI AD sebagai institusi yang memiliki pengalaman dalam operasi penanggulangan bencana, sinergi itu sendiri bersubstansi kolaborasi, komunikasi dan kerja sama sehingga efektif dalam penanggulangan bencana alam⁸.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, studi literatur, serta dilakukan pula focus group discussion (FGD). Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teknik pengujian keabsahan data melalui member cek, teman sejawat, perpanjangan

pengamatan, dan triangulasi data. Teknik sampling ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga unsur, yakni unsur Kodim 1611/Badung, Pemda Kabupaten Badung, dan elemen masyarakat. Unsur Kodim 1611/Badung meliputi: Dandim, Kasdim, Pasiter, Pasilog, Pasiops, dan Pasimin. Unsur Pemda Kabupaten Badung meliputi: Kepala BPBD, Kepala Bappeda, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Kadis PU, dan Kepala Kesbangpol. Unsur masyarakat antara lain: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru, dosen, karang taruna, tagana, PMI, BMKG, Orari, Tim SAR, wartawan, serta Ormas/LSM kebencanaan.

PEMBAHASAN

Kerawanan Bencana Alam di Kabupaten Badung

Wilayah Kabupaten Badung berada di wilayah yang rawan bencana alam. Wilayah Kabupaten Badung sangat kompleks dan kaya akan sumber daya alam karena memiliki wilayah yang sangat lengkap. Di wilayah ini terdapat pegunungan, perbukitan, sungai, dan dataran tinggi yang ada di wilayah bagian utara. Di bagian selatan terdapat wilayah pantai dan perkotaan yang sangat padat.

Di wilayah bagian utara sangat rawan terjadinya bencana alam berupa tanah longsor dan banjir. Sedangkan di wilayah selatan terdapat potensi gempa bumi, tsunami, dan kebakaran. Bencana alam ini sangat mengancam keselamatan manusia, membahayakan aktivitas manusia dan dapat merusak semua fasilitas fisik, fasilitas sosial, dan infrastruktur yang telah dibangun dan menunjang kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Badung.

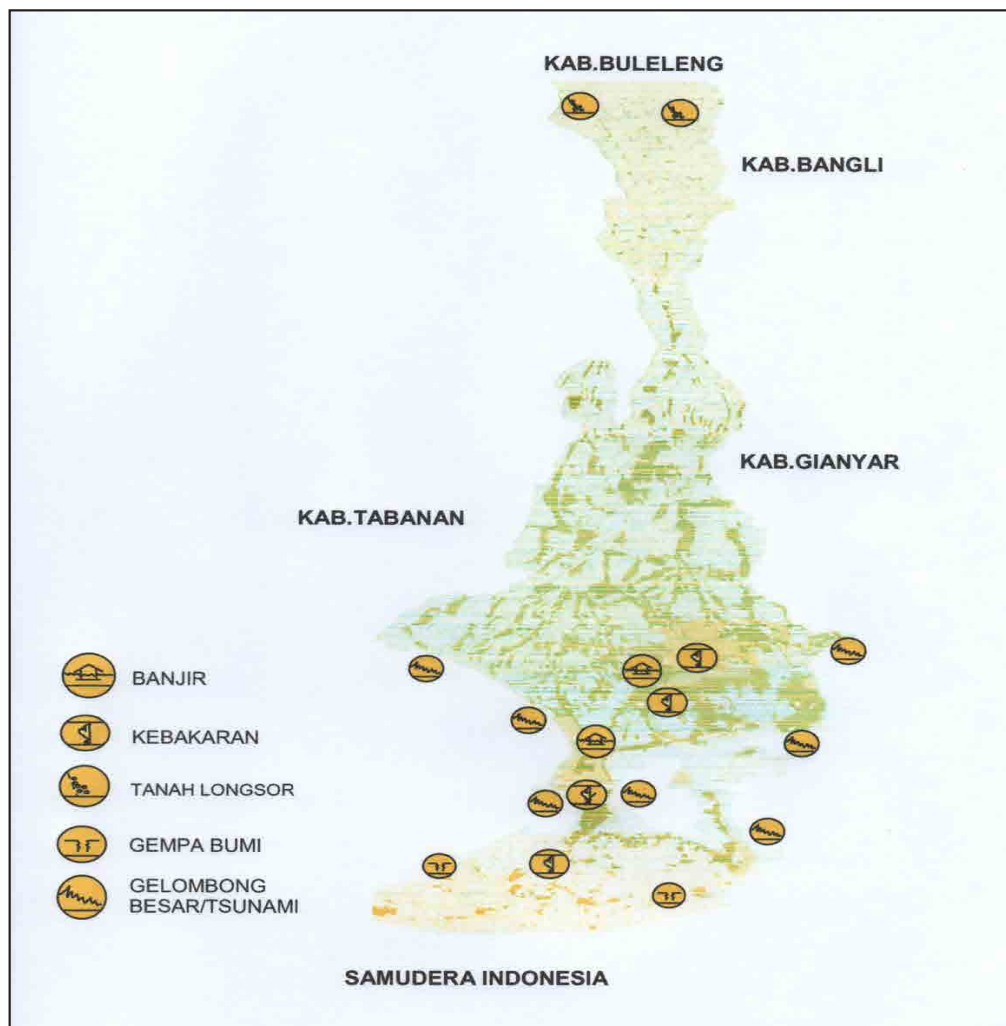
Bencana alam yang besar dan berskala nasional dengan korban nyawa dan harta benda yang banyak memang belum terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Jika pun ada

8 Disarikan dari Covey, Stephen R. 1997. *Principle Centered Leadership*. Jakarta: Binarupa Aksara

sebagaimana dikemukakan pada pendahuluan bahwa bencana banjir dan longsor pernah terjadi dalam dua tahun terakhir ini yakni di Kevamatan Petang dan Kuta, walaupun tidak mengakibatkan korban jiwa namun secara fisik terdapat korban harta benda berupa kerusakan rumah dan beberapa kendaraan, dan jika tidak ditanggulangi secara umum dapat merugikan Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasi pariwisata. Artinya bahwa meskipun bencana alam yang terjadi dalam esakalasi yang kecil tidak bencana nasional. semua potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Badung sangat besar terjadi. Wilayah

Kabupaten Badung yang memiliki wilayah pantai baik Pantai Sanur, Pantai Kuta, maupun pantai di pesisir Nusadua, sangat berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Hal ini harus diwaspadai dan dicarikan antisipasi sehingga apabila benar terjadi bencana alam tersebut, maka segala upaya dapat dilakukan untuk mengantisipasi resiko korban nyawa dan harta benda yang besar.

Berikut ini akan diuraikan gambar berupa peta daerah rawan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Badung:



Gambar 1

Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Badung

Sumber: *Petunjuk Teritorial di Wilayah Kodim 1611/Badung, Tahun 2017*

Untuk mengetahui jenis bencana per kecamatan di wilayah Kabupaten Badung,

tabel berikut ini akan menjelaskannya secara detail:

Tabel 1

Daerah Rawan Bencanadi Kabupaten Badung

NO	SATUAN	KECAMATAN	RAWAN
1	Koramil 1611-01/Dentim	Denpasar Timur	Kebakaran
		Denpasar Utara	Kebakaran
2	Koramil 1611-02/Densel	Denpasar Selatan	Banjir dan Tsunami
3	Koramil 1611-03/Kuta	Kuta	Kebakaran dan Tsunami
		Kuta Utara	Kebakaran, Banjir dan Tsunami
4	Koramil 1611-04/Mengwi	Mengwi	Banjir
5	Koramil 1611-05/Abiansemal	Abiansemal	Tanah Longsor
6	Koramil 1611-06/Petang	Petang	Tanah Longsor
7	Koramil 1611-07/Denbar	Denpasar Barat	Banjir
8	Koramil 1611-08/Kuta Selatan	Kuta Selatan	Gempa Bumi

Sumber: Petunjuk Teritorial di Wilayah Kodim 1611/Badung, Tahun 2017

Sinergi Kodim 1611/Badung dengan Pemda Kabupaten Badung

Sinergi antara Kodim 1611/Badung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penanggulangan bencana alam sangat diperlukan, ditingkatkan, dan dipelihara, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Kodim 1611/Badung memiliki sumber daya manusia berupa personel yang mumpuni, terlatih, terdidik, dan kompeten dalam urusan penanganan bencana alam, namun tidak memiliki anggaran dan sarana prasarana yang besar untuk mendukung penanggulangan bencana alam. Sedangkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung kurang memiliki sumber daya manusia yang terlatih di dalam organisasi BPBD nya, namun memiliki anggaran yang besar dalam alokasi APBD setiap tahunnya dan memiliki sarana prasarana/peralatan/alat berat yang lengkap dan modern dalam mendukung penanggulangan bencana alam.

Hal inilah yang tentunya menjadi potensi terwujudnya sinergi berupa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif antara Kodim 1611/Badung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penanganan

bencana alam di berbagai wilayah di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan sinergi yang telah terjalin antara Kodim 1611/Badung dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penanggulangan bencana alam.

Pra Bencana

Pada tahap/masa/fase sebelum bencana atau pra bencana, telah terjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang cukup efektif antara jajaran Kodim 1611/Badung dengan pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam penanggulangan bencana alam. Komunikasi dilakukan oleh Dandim terhadap Bupati, Ketua DPRD dan Kepala BPBD Kabupaten Badung untuk membahas tentang upaya menyadarkan masyarakat akan terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah Kabupaten Badung, melalui sosialisasi, pembimbingan, dan penyuluhan ke berbagai kecamatan dan desa/perbekel sehingga diharapkan masyarakat akan sadar akan bahaya bencana alam.

Kegiatan kolaborasi yang dilakukan antara Kodim 1611/Badung dengan BPBD Kabupaten Badung dalam mitigasi bencana dan berbagai upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya

bencana alam adalah memberikan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, memperbaiki selokan, melarang mendirikan bangunan di bantaran sungai, menanam pohon di wilayah perbukitan yang gundul, serta memperketat perijinan pendirian bangunan di daerah hutan lindung maupun daerah hijau lainnya.

Selain itu, dilakukan pula setiap tahunnya pelatihan antara personel TNI, Polri dan jajaran BPBD yang melibatkan tagana, orari, PMI, maupun ormas/LSM kebencanaan tentang sistem peringatan dini tsunami yang dilakukan di wilayah Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Pandawa, maupun berbagai pantai di wilayah Nusadua. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang bisa saja terjadi di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Badung, yang banyak wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik.

Selama ini telah ada Perda maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam, yakni Perda No. 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, Perda No. 70 Tahun 2013 tentang pedoman penggunaan dana siap pakai pada penanganan kedaruratan di Kabupaten Badung, Perda No. 16 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana, dan Perbup No. 18 Tahun 2012 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana Kabupaten Badung.

Saat Bencana

Pada tahap tanggap darurat/saat bencana alam terjadi, telah terjalin sinergi yang efektif antara jajaran Kodim 1611/Badung dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten Badung, khususnya BPBD Kabupaten Badung. Bencana alam yang besar dan berskala nasional memang belum pernah terjadi di wilayah Kabupaten Badung, namun bencana dengan skala lokal sering terjadi, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin puting beliung, kebakaran lahan, dan gempa bumi dengan skala yang di bawah 5 skala Richter.

Komunikasi dan koordinasi selalu dijalin antara Dandim dengan jajaran Pemda dan BPBD Kabupaten Badung ketika bencana alam terjadi, khususnya pada tanggap darurat, yang diprioritaskan untuk evakuasi korban dan penyelamatan nyawa manusia yang terkena dampak banjir, tanah longsor maupun kebakaran lahan. Rapat koordinasi selalu dilakukan pada masa tanggap darurat untuk mengidentifikasi korban bencana, jumlah kerugian materiil maupun pemenuhan kebutuhan pengungsi.

Selain itu, kolaborasi selalu ditunjukkan oleh aparat di level bawah, seperti Babinsa dengan kepala desa/perbekel setiap terjadi bencana alam. Antara Babinsa dan Perbekel selalu datang lebih cepat di TKP dan selalu melakukan tindakan pertama di TKP saat terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung, maupun pohon tumbang. Babinsa bersama-sama dengan Perbekel selalu cepat, tepat dan tanggap dalam melakukan evakuasi korban, membawa korban ke rumah sakit, dan menolong masyarakat korban bencana ke pengungsian sementara. Babinsa dan perbekel dalam melakukan evakuasi korban juga dibantu oleh Babinkamtibmas (Polri), Tagana, Orari, Ormas/LSM kebencanaan, dan karang taruna.

Pasca Bencana

Pada tahap pasca bencana/setelah bencana, sudah terjalin sinergi yang efektif antara jajaran Kodim 1611/Badung dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten Badung, khususnya dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Antara Kodim 1611/Badung dengan Pemda Kabupaten Badung saling bahu membahu dan saling melengkapi untuk membangun berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana alam sehingga dapat segera pulih dan dapat dipergunakan lagi untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Komunikasi selalu terjalin antara Dandim, Kasdim, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Kepala BPBD untuk mengkomunikasikan tentang kerusakan jalan, jembatan, gedung perkantoran, maupun rumah yang rusak

maupun ambruk dan hancur akibat bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang maupun angin puting beliung. Pendataan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak dilakukan oleh kedua belah pihak dan kemudian dilakukan diskusi dan dialog untuk memperbaiki secara bersama-sama dimana anggarannya berasal dari Pemda, sedangkan pelaksanaannya adalah personel Kodim dan Koramil yang dibantu oleh Polri dan BPBD.

Koordinasi juga dilakukan oleh jajaran Kodim 1611/Badung dengan jajaran BPBD untuk membahas pemenuhan kebutuhan di tempat pengungsian dengan membuat dapur umum, penyelenggaraan pelayanan kesehatan darurat, pelayanan pendidikan darurat dan konseling psikologi untuk menghilangkan trauma para korban maupun pengungsi. Personel Kodim bersama sama dengan anggota BPBD selalu berada di pengungsian untuk mengatur kebutuhan makan, sandang dan berbagai permasalahan yang muncul di tempat pengungsian agar supaya pengungsi tetap tercukupi kebutuhan dan tetap semangat menjalani kehidupan di pengungsian untuk sementara waktu.

Kolaborasi yang dilakukan antara jajaran personel Kodim 1611/Badung dengan jajaran Pemda Kabupaten Badung dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas sosial, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam. Dilakukan program operasi bhakti dan kegiatan TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) oleh Kodim 1611/Badung yang didukung oleh Pemda Kabupaten Badung untuk melakukan berbagai perbaikan dan renovasi serta rehabilitasi terhadap berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Pemda Kabupaten Badung mendukung dengan pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Badung, sedangkan Kodim 1611/Badung menyediakan tenaga/personel untuk mengerjakannya sehingga lebih murah dan cepat.

Hambatan yang Dihadapi

Sinergi antara jajaran Kodim 1611/Badung dengan aparat Pemda Kabupaten Badung,

khususnya BPBD Kabupaten Badung dalam menggelar operasi penanggulangan bencana alam yang sebenarnya sudah cukup efektif masih ada hambatan atau kendala. Hambatan yang dihadapi Kodim 1611/Badung dan Pemda Kabupaten Badung dalam penanggulangan bencana alam antara lain sebagai berikut.

a. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

Kodim 1611/Badung masih mengalami keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana alam sehingga memengaruhi kinerja dalam pelaksanaan tugas operasi penanggulangan bencana alam membantu pemerintah daerah. Alokasi anggaran dari Kodam dan Korem sangat minim dan habis untuk kebutuhan rutin sehari-hari. Adapun sarana prasarana, peralatan, almatsus, serta peralatan berat yang dibutuhkan untuk membantu evakuasi korban bencana saat tanggap darurat, misalnya tanah longsor atau banjir, tidak ada.

b. Kualitas BPBD Kabupaten Badung yang masih lemah.

Organisasi BPBD merupakan SKPD/OPD yang berada di bawah struktur organisasi Pemda Kabupaten Badung dimana personilnya belum semua terdidik, terlatih, dan memiliki kompetensi di bidang kebencanaan, sehingga memengaruhi kinerja BPBD dalam setiap pelaksanaan tugas kebencanaan. Personel yang ditugaskan di BPBD masih dianggap sebagai personel buangan, masuk kotak, dan sulit naik kariernya. Jarang sekali orang yang ditugaskan di BPBD secara ikhlas karena panggilan kemanusiaan sehingga banyak yang menginginkan untuk pindah ke dinas lain yang lebih basah dan prospektif bagi kariernya.

c. Ego sektoral antar instansi.

Masih ada ego sektoral, ego kelembagaan, dan ego organisasi dalam penanggulangan bencana alam, dimana tidak jarang ada yang menginginkan tampil di depan,

sok pahlawan, dan ingin disorot media sebagai lembaga/organisasi yang paling berjasa dalam evakuasi korban bencana alam. Setiap instansi masih ada yang menginginkan tampil di depan dan saling berebut dan berkompetisi untuk disorot media sebagai pihak yang paling berjasa dalam menolong korban bencana agar supaya mendapatkan pujian, prestasi maupun hadiah tertentu.

d. **Belum ada MoU antara Kodim dengan Pemda dalam penanggulangan bencana alam.**

Selama ini di Kabupaten Badung belum ada semacam MoU antara Kodim 1611/Badung dengan Pemda Kabupaten Badung yang mengatur tentang siapa berbuat apa, kapan, dan bagaimana cara mengerjakannya. MoU tersebut sangat penting agar supaya tidak terjadi tumpang tindih atau overlaping antar instansi dalam tahapan bencana alam, baik tahap para bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Payung hukum berupa MoU sangat penting untuk mengatur kewenangan maupun batasan bertindak antara Kodim 1611/Badung dengan Pemda Kabupaten Badung dalam penanggulangan bencana, termasuk proses penggunaan peralatan berat BPBD oleh Kodim dan proses penyaluran anggaran APBD untuk Kodim dalam operasi penanggulangan bencana alam.

e. **Kesadaran masyarakat yang masih rendah.**

Kesadaran masyarakat terhadap bencana alam sangat penting untuk mendukung operasi penanggulangan bencana alam. Kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Badung masih cukup rendah, terbukti dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai/selokan, mendirikan bangunan di bantaran sungai, menebang pohon di hutan lindung, mendirikan bangunan tanpa IMB di wilayah perbukitan, maupun tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan. Perilaku

masyarakat yang tidak peduli lingkungan sekitarnya ini berpotensi timbulnya bencana banjir, tanah longsor dan pohon tumbang, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam operasi penanggulangan bencana alam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kabupaten Badung yang berada di wilayah Provinsi Bali merupakan Kabupaten yang sangat strategis karena menjadi pusat pariwisata yang ada di wilayah Bali dimana terdapat Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Pandawa, kawasan Nusadua, dan berbagai obyek wisata lainnya sehingga menjadi destinasi bagi wisatawan asing dan wisatawan domestik. Wilayah ini menjadi daya tarik wisatawan dunia sehingga harus terjaga dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana alam.

Ancaman bencana alam yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Badung dengan skala yang kecil/rendah adalah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, pohon tumbang, kebakaran lahan, dan gempa bumi. Ancaman bencana alam ini perlu dilakukan langkah pencegahan dan penanganannya secara cepat, tepat, dan sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu kegiatan pariwisata dan pembangunan daerah.

Upaya penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bersama dengan jajaran Kodim 1611/Badung relatif baik, pada tahap sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Kegiatan teknis komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara jajaran Kodim 1611/Badung dengan aparat BPBD Kabupaten Badung selalu dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan untuk mendeteksi potensi terjadinya bencana, upaya mitigasi bencana, melakukan evakuasi korban saat tanggap darurat, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Hambatan yang dihadapi Kodim 1611/Badung dan Pemda Kabupaten Badung

dalam penanggulangan bencana alam adalah masih belum optimlnya anggaran Kodim, keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki Kodim, kualitas/kompetensi aparat BPBD yang masih rendah, adanya ego sektoral antar instansi dalam penanggulangan bencana alam, belum adanya MoU antara Pemda dengan Kodim dalam penanggulangan bencana alam, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana alam.

Saran

Saran/rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi yang dilakukan oleh kedua instansi baik TNI AD maupun Pemerintah Daerah hendaknya dilaksanakan lebih komprehensif mulai penerapan anggaran, pelatihan mitigasi dan sarana sehingga manakala akan dilaksanakan penanggulangan baik mulai tahap pra, mitigasi maupun pasca bencana sudah dapat teridentifikasi apa yang harus dilakukan untuk membangun sinerg tersebut
2. MoU antara TNI AD dalam hal ini Kodim Badung dan Pemerintah Daerah hendaknya dapat dilakukan sehingga terdapat dasar dalam melakukan kolaborasi, kerja sama dan komunikasi (sinergi) antar instansi tersebut dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam
3. Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana hendaknya dilakukan secara rutin dengan melibatkan partisipasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ketut Suartini, *Evaluasi Kinerja BPBD Kabupaten Badung Dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana*, Skripsi, Fakultas ISIP, Universitas Udayana Bali, Denpasar, 2014
- Laporan Tahunan Kodim 1611/Badung, Tahun 2017.
- Petunjuk Teritorial di Wilayah Kodim 1611/Badung, Tahun 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Seskoad, *Sinergitas TNI AD dengan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*, Bandung, 2017
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Website

- <http://dmccd.net/siklus-manajemen-bencana/>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.
- <http://maysandi.blogspot.co.id/2012/04/manajemen-bencanamanajemen-bencana.html>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.
- <http://wahyuekobudianto.blogspot.co.id/2013/06/siklus-disaster-manajemen.html>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.
- <http://www.jakartaconsulting.com/publications/articles/organization-development-behavior/manajemen-bencana-juni-2006>. Diunduh pada 1 Desember 2017, Jam 14.00 WIB.

